

# RANCANGAN AKHIR

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**Damai  
dalam  
Keragaman**

**Bersatu  
Membangun  
Negeri**

**JULI 2023**

Jl. Jendral Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Phone : +62561 736351 Fax : +62561 767242

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, secara umum memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 telah mengakomodir visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, maka keberadaan dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat penting dan strategis untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Akhimya semoga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini dapat terealisasi yang didukung dengan pendanaan yang proporsional guna melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat.

Pontianak, Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Drs. MANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670221 198603 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I      PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Perbandingan Penganggaran Tahun 2021 s.d. Tahun 2023. ....	32
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	36
2.5 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	40
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	71
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	71
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	71
3.3 Program dan Kegiatan .....	73
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	74
BAB V     PENUTUP .....	108

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis limatahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra PD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja PD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Rensta PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD disusun oleh Perangkat Daerah (PD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja PD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Renja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Badan Kesbangpol) Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yang merupakan penjabaran Program dari Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026.

Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Tahap penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

## 1.2. Landasan Hukum

Produk-produk hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Badan Kesbangpol Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesbangpol untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
5. Sebagai acuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol;
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja perangkatdaerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program danKegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana kerja yang diusulkan serta jumlah dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

**BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidahpelaksanaan serta Rencana tindak lanjut

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Renja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Kesbangpol Tahun 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan realisasi capaian 102.35%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan keluaran tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) Dokumen yakni 1 Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah dan 1 Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan keluaran tersusunnya Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 (satu) Dokumen yakni Dokumen DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022.
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan keluaran tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 (satu) Dokumen yakni Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan keluaran tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 (satu) Dokumen yakni Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2022.
    - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan keluaran tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 3 (tiga) Dokumen 1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen LKPJ, dan 1 Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2022.



- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan keluaran tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 (dua belas) bulan;
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan keluaran tersusunnya administrasi keuangan sesuai ketentuan selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan keluaran tersedianya Polis Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 4 (empat) Polis.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan keluaran tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan;
  - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan keluaran tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 12 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian selama 12 (dua belas) bulan;.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan keluaran tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 (dua belas) bulan;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan keluaran tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 (dua belas) bulan;
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan keluaran tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebanyak 60 jenis selama 12 (dua belas) bulan;
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan keluaran tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 12 (dua belas) bulan;
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan keluaran tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 (dua belas) bulan;
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan keluaran tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 (dua belas) bulan.
  - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan keluaran tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1240 Kotak selama 12 (dua belas) bulan;

- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan keluaran tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 45 Kali selama 12 (dua belas) bulan;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan keluaran tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 Unit;
  - 2) Pengadaan Asset Tak Berwujud, dengan keluaran tersedianya Unit Asset Tak Berwujud yang Disediakan sebanyak 1 Unit;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan keluaran Jumlah Dokumen Surat yang terkirim sebanyak 10 Dokumen Surat yang dikirim melalui jasa pengiriman/ekspedisi.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan keluaran tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 (dua belas) bulan;
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan keluaran tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 (dua belas) bulan.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan keluaran Barang Milik Daerah terpelihara sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) Unit;
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan keluaran jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara sesuai ketentuan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit.

**2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,** dengan realisasi capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan keluaran antara lain:
    - a) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang peserta dan Tersusunnya Laporan Kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan sebanyak 1 Dokumen;
    - b) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Peringatan Hari Bela Negara dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang peserta dan Tersusunnya Kegiatan Peringatan Hari Bela Negara sebanyak 1 Dokumen

- c) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Dialog Kebangsaan Pembumih Pancasila dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang peserta dan Tersusunnya Laporan Kegiatan Dialog Kebangsaan Pembumih Pancasila sebanyak 1 Dokumen;
  - d) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Dialog Patriotisme Bela Negara dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dan Tersusunnya Laporan Kegiatan Dialog Patriotisme Bela Negara sebanyak 1 Dokumen;
  - e) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang dan Tersusunnya Laporan Kegiatan Peringatan Hari Lahir Pancasila sebanyak 1 (satu) Dokumen;
  - f) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang dan Tersusunnya Laporan Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebanyak 1 (satu) Dokumen;
  - g) Terfasilitasinya Jumlah Forum yang mendapat Hibah Berupa uang berjumlah 1 (satu) Forum, dan Tersusunnya Laporan Bantuan Jumlah Forum yang mendapat Hibah Berupa uang sebanyak 1 (satu) Dokumen.
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan keluaran antara lain :
- a) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Kerja Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang Peserta dan tersusunnya Laporan Rapat Kerja Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - b) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Kerja Pusat Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang Peserta dan tersusunnya Laporan Rapat Kerja Pusat Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - c) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang Peserta dan tersusunnya Laporan Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - d) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang Peserta dan tersusunnya Laporan Rapat Kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.

- 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**, dengan realisasi capaian sebesar 102.09% Adapun kegiatannya sebagai berikut:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan keluaran antara lain:
      - a) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan FGD Politik bagi Perempuan di Provinsi Kalimantan Barat dengan Jumlah peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Kegiatan FGD Politik bagi Perempuan di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.
      - b) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Lomba Pidato Etika dan Budaya Politik dengan Jumlah peserta sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Orang dan tersusunnya Laporan Kegiatan Lomba Pidato Etika dan Budaya Politik sebanyak 1 (satu) Dokumen.
      - c) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat dengan Jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Pembinaan Kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.
      - d) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik bagi Pemilih Pemula dengan Jumlah peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Pembinaan Politik bagi Pemilih Pemula sebanyak 1 (satu) Dokumen.
      - e) Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Talk Show Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dengan Jumlah peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Kegiatan Talk Show Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda sebanyak 1 (satu) Dokumen.
      - f) Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi administrasi Bantuan Keuangan Parpol Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 12 (dua belas) Dokumen.
- 4. Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**, dengan realisasi capaian sebesar 102.09%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan keluaran antara lain:
  - a) Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Ormas Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 70 (tujuh puluh) Orang dan tersusunnya Laporan kegiatan Pembinaan Ormas Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - b) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 20 (dua puluh) Orang dan tersusunnya Laporan kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - c) Jumlah lembaga/organisasi yang menerima Bantuan Keuangan sebanyak 1 (satu) Ormas dan tersusunnya Laporan Tim Verifikasi Pengelolaan Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - d) Jumlah dokumen verifikasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat sebanyak 5 (lima) ormas dan tersusunnya Laporan Fasilitas Pelayanan Verifikasi Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.

**5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,** dengan realisasi capaian sebesar 102.09%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan keluaran antara lain:
    - a) Jumlah peserta yang mengikuti Forum Kerukunan Umat Beragama sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dan tersusunnya Laporan Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen.

**6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial,** dengan realisasi capaian sebesar 102.09%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan keluaran antara lain:

- a) Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Kalbar sebanyak 140 (seratus empat puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Kalbar sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - b) Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebanyak 45 (empat puluh lima) Orang dan tersusunnya Laporan Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - c) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Korodinasi Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebanyak 90 (sembilan puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Rapat Korodinasi Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - d) Jumlah peserta yang mengikuti Pusat Komunikasi dan Informasi sebanyak 50 (lima puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Pusat Komunikasi dan Informasi sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  - e) Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Mahasiswa dan Generasi Muda sebagai Agen Pencegahan Konflik sebanyak 70 (tujuh puluh) Orang dan tersusunnya Laporan Pengembangan Kapasitas Mahasiswa dan Generasi Muda sebagai Agen Pencegahan Konflik sebanyak 1 (satu) Dokumen.
- 2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah dengan keluaran terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebanyak 4 (empat) Kali Rapat.

Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Capaian Kinerja per Program Tahun Anggaran 2022

<b>Program 1 :</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Persentase Dokumen yang disusun dibagi dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di SKPD	%	97,95	102,35	100,25

<b>Program 2 :</b>		<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100
<b>Program 3 :</b>		<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>		
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Meningkatnya Persentase Pemahaman Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	%	97,95	102,09	104,2
<b>Program 4 :</b>		<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	97,95	102,09	104,2

<b>Program 5 :</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Meningkatnya Persentase Pemahaman Masyarakat diBidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,dan Budaya.	%	97,95	102,09	104,2
<b>Program 6 :</b>				
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>				
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	%	97,95	102,09	104,2



**Tabel 2 (T-C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 s.d. Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat**

Nama Perangkat Dearah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Dokumen yang disusun dibagi dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di SKPD</b>		<b>96,45</b>	<b>97,95</b>	<b>102,35</b>	<b>100,25</b>	<b>98,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100</b>			
	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	2	2	2	2	100	2	2	2
	koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD yang tersedia	0	0	1	1	100	0	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD yang tersedia	0	0	1	1	100	0	0	0
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	1	0	1	1	100	1	1	1
	evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	3	3	3	3	100	3	3	3
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	12	12	12	100	38	38	38
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100	12	12	12

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	100			
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	1	4	4	100	4	4	4
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	160	156	0	0	0	160	160	160
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	0	12	12	100	2	2	2
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	0	12	12	100	12	12	12
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	0	0	0	100	15	15	15
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>60</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	12	12	100	1	1	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	12	12	12	100	0	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	12	60	60	100	1	1	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	12	12	12	100	1	1	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	12	12	12	100	1	1	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	12
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	1240	1240	100	12	12	12

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	0	45	45	100	10	10	10
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	1	1	100	0	0	0
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	1	1	100	0	0	0
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>28</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	40	40	100	0	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12	12	12	100	1	1	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	4	12	12	100	1	1	1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>64</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	4	4	4	100	4	4	4
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	60	69	69	100	4	4	4
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	580	147	380	380	100	580	580	580
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240	147	265	265	100	240	240	240
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>			<b>100</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				<b>100</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	265, 12	616, 12	407, 12	407, 12	100	265, 12	265, 12	265, 12



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parta iPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	240	0	0	0	0	240	240	240
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			<b>100</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>100</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60	70	150	150	100	60	60	60
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>			<b>100</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tersedia</b>		<b>100</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	300	180	180	100	50	50	50
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120	0	0	0	0	120	120	120

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>			<b>99,67</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial tersedia		<b>99,67</b>	<b>97,95</b>	<b>102,09</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60	296	360	360	100	60	60	60
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70	0	0	0	0	70	70	70

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1	3	4	4	100	1	1	1

Dari evaluasi hasil pelaksanaan renja yang disajikan pada tabel Tabel 2.2 (T- C.29) diatas dapat didefinisikan bahwa untuk menilai realisasi/capaian program/kegiatan baik yang tidak memenuhi target kinerja, yang telah memenuhi target kinerja maupun yang melebihi target kinerja hasil/keluaran diukur berdasarkan capaian indikator utama yaitu Persentase Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik yg dilaksanakan dengan 5 (lima) program utama sesuai dalam iklimkehidupan masyarakat yang aman nyaman dan kondusif yaitu :

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.  
Meningkatnya persentase Penguatan terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Target kinerja renja 100 % realisasi 100 % dengan Tingkat Realisatarget kinerja hasil/ keluaran 102.09 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.  
Meningkatnya persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Target kinerja renja 97,95 % realisasi 100 % dengan Tingkat Realisasi target kinerja hasil/ keluaran 102,09 % dan termasuk dalam kategori sangat Sangat baik.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.  
Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Target kinerja renja 97,95 % realisasi 100 % dengan Tingkat Realisasi target kinerja hasil/ keluaran 102,09 % dan termasuk dalam kategorisangat Sangat baik.
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.  
Meningkatnya Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Target kinerja renja 97,95 % realisasi 100 % dengan Tingkat Realisasi target kinerja hasil/ keluaran 102,09 % dan termasuk dalam kategori sangat Sangat baik.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Target kinerja renja 97,95 % realisasi 99,67 % dengan Tingkat Realisasi target kinerja hasil/ keluaran 102,09 % dan termasuk dalam kategori sangat Sangat baik.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan capaian kerjanya sangat berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat akan terlihat dengan meningkatnya Presentase sesuai dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

**Tabel 3 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Presentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.			100	100	100	41.40	100	100	100	41.40	
2.	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			97,75	97,95	98,25	30.41	102,20	97,95	98,25	30.41	
3.	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat			97,75	97,95	98,25	57.01	102,20	97,95	98,25	57.01	
4.	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.			97,75	97,95	98,25	0.32	102,20	97,95	98,25	0.32	
5.	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah			97,75	97,95	98,25	33.91	101,86	97,95	98,25	33.91	



## 2.3 Perbandingan Penganggaran Tahun 2021 s.d. Tahun 2023.

**Tabel 4 (T-C.31)**  
Perbandingan Penganggaran Tahun 2021 s.d. Tahun 2023  
Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3		
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>7.362.787.923,00</b>	<b>7.280.009.158,00</b>	<b>7.022.478.451,00</b>
<b>8.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>113.951.558,00</b>	<b>140.679.100,00</b>	<b>157.799.600,00</b>
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.103.356,00	57.875.500,00	79.799.600,00
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	20.000.000,00
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	19.106.400,00	0,00
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0,00	18.678.400,00	0,00
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	18.031.200,00	28.000.000,00
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.848.202,00	26.987.600,00	30.000.000,00
<b>8.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.410.695.188,00</b>	<b>5.559.949.440,00</b>	<b>5.581.939.836,00</b>
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.109.495.668,00	5.268.336.340,00	5.281.059.836,00
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	301.199.520,00	291.613.100,00	300.880.000,00
<b>8.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>8.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>104.441.200,00</b>	<b>74.816.400,00</b>	<b>194.063.400,00</b>
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.441.200,00	0,00	102.858.500,00
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	65.715.200,00	34.999.800
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	9.101.200,00	9.205.100,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3		
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	47.000.000,00
<b>8.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>310.504.398,00</b>	<b>480.423.630,00</b>	<b>378.808.015,00</b>
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.885.675,00	11.563.640,00	11.499.800,00
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	67.998.600,00	0,00
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.069.781,00	46.063.700,00	45.998.000,00
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.683.792,00	145.287.140,00	139.738.500,00
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.343.400,00	65.488.800,00	38.170.000,00
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.521.750,00	11.521.750,00	13.080.000,00
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	18.000.000,00	17.920.000,00
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	114.500.000,00	97.672.515,00
<b>8.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>311.388.000,00</b>	<b>0,00</b>
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	261.388.000,00	0,00
8.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	50.000.000,00	0,00
<b>8.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>280.927.764,00</b>	<b>535.516.708,00</b>	<b>559.014.800,00</b>
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	527.948,00	974.888,00	0,00
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.160.296,00	93.179.300,00	109.080.000,00
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.239.520,00	441.362.520,00	449.934.800,00
<b>8.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>138.767.815,00</b>	<b>173.735.880,00</b>	<b>147.352.800,00</b>
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.859.690,00	101.636.537,00	86.510.900,00
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.908.125,00	72.099.343,00	60.841.900,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3		
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>399.944.325,00</b>	<b>542.503.400,00</b>	<b>413.653.000,00</b>
<b>8.01.02.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>399.944.325,00</b>	<b>542.503.400,00</b>	<b>413.653.000,00</b>
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	375.659.617,00	372.698.600,00	256.276.800,00
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	24.284.708,00	169.804.800,00	157.376.200,00
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>4.028.577.637,00</b>	<b>7.075.933.787,00</b>	<b>32.138.091.800,00</b>
<b>8.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>4.028.577.637,00</b>	<b>7.075.933.787,00</b>	<b>32.138.091.800,00</b>
8.01.03.1.01	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	0,00	0,00	32.084.881.900,00
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	4.028.577.637,00	7.075.933.787,00	53.209.900,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3		
	Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>351.367.960,00</b>	<b>203.643.400,00</b>	<b>211.374.000,00</b>
<b>8.01.04.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>351.367.960,00</b>	<b>203.643.400,00</b>	<b>211.374.000,00</b>
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	351.367.960,00	203.643.400,00	211.374.000,00
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>408.196.415,00</b>	<b>20.139.286.690,00</b>	<b>200.950.000,00</b>
<b>8.01.05.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>408.196.415,00</b>	<b>20.139.286.690,00</b>	<b>200.950.000,00</b>
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0,00	20.139.286.690,00	108.342.400,00
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	408.196.415,00	0,00	92.607.600,00
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>910.817.085,00</b>	<b>1.482.253.970,00</b>	<b>1.600.380.900,00</b>
<b>8.01.06.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>910.817.085,00</b>	<b>1.482.253.970,00</b>	<b>1.600.380.900,00</b>

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3		
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	0,00	0,00	205.112.900,00
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377.315.085,00	394.085.500,00	215.457.200,00
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	533.502.000,00	1.088.168.470,00	1.179.810.800,00
	<b>Total</b>	<b>13.461.691.345,00</b>	<b>36.723.630.405,00</b>	<b>41.586.928.151,00</b>

## 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat, makamasalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam tiga tahun ke depan yaitu :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut :
  - a. Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di masyarakat;
  - b. Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat;
  - c. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
2. Bidang Politik Dalam Negeri
  - a. Kurangnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;

- b. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;
  - d. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan. terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi.
3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat
- a. Kurangnya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi masyarakat di wilayah provinsi;
  - b. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi masyarakat di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi masyarakat ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi masyarakat di wilayah provinsi;
  - d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi masyarakat di wilayah provinsi;
  - e. Terbatasnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi masyarakat di wilayah provinsi.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- a. Kurangnya pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;

- b. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam;
- g. Masih maraknya aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
- h. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang keliru.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Provinsi Kalimantan Barat, dapat dikemukakan isu strategis dan Tantangan yang dihadapi Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsi antara lain :

- a. Masih belum meratanya kompetensi sumber daya manusia untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaantugas dan fungsi;
- c. Masih belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan Politik;
- d. Masih belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian dan pangamalan wawasan kebangsaan;
- e. Masih belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap peran partai politik sebagai wadah aspirasi dan sebagai mitra pemerintah;

- f. Masih belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, forum pembauran kebangsaan dan lembaga-lembaga lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Masih belum optimalnya pembinaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
- h. Masih belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap penanganan konflik sosial di daerah;
- i. Masih belum optimalnya dukungan anggaran dari Pemerintah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub Kegiatan;
- j. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah;
- k. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi;
- l. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat;
- m. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat;
- n. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilkada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat;
- o. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun ke depan adalah:

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, penyelenggaraan sistem pilkada serentak, dan pemilihan Kepala Daerah Serentak;
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat Undang-Undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing;"
- d. Adanya peluang dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,



Badan Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah menetapkan isu strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase Pemahaman bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Meningkatkan persentase Pemahaman bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- c. Meningkatkan persentase Terhadap Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- d. Meningkatkan persentase Pemahaman bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- e. Meningkatkan persentase Pemahaman bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

## 2.5 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Telaahan terhadap rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RenstraSKPD dan tingkat kinerja yang dicapai SKPD, dengan arahan Kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rumusan rencana program dan kegiatan yang diusulkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada rancangan akhir RKPD tahun 2024 seperti disajikan pada Tabel 5 (T-C.32) sebagai berikut:

**Tabel 5 (T-C.32)**

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Indeks Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,61</b>	<b>269.090.042.634</b>	<b>PAD</b>	
	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALBAR</b>	<b>Persentase Pemahaman kelompok Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,61</b>	<b>269.090.042.634</b>	<b>PAD</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Pontianak</b>	<b>42,49</b>	<b>7.092790.236</b>	<b>PAD</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>32,81</b>	<b>162.105.700</b>	<b>PAD</b>	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	2	75.665.700	PAD	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	1	28.122.600	PAD	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	1	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	12	27.074.500	PAD	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	3	31.242.900	PAD	
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>57,35</b>	<b>5.635.987.836</b>	<b>PAD</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	49	5.281.059.836	PAD	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pontianak	1	0	PAD	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	12	333.360.000	PAD	
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pontianak	1	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pontianak	12	21.568.000	PAD	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pontianak	1	0	PAD	
	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	<b>3.500.000</b>	<b>PAD</b>	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	3.500.000	PAD	
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	4	0	PAD	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	0	PAD	
	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>36,68</b>	<b>79.190.000</b>	<b>PAD</b>	
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pontianak	1	0	PAD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pontianak	1	0	PAD	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	49	24.190.000	PAD	
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	1	0	PAD	
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	49	0	PAD	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	15	0	PAD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	15	0	PAD	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pontianak	15	55.000.000	PAD	
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kedalam dan Keluar Daerah</b>	<b>34,00</b>	<b>492.071.900</b>	<b>PAD</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	10.522.000	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	50.234.400	PAD	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Pontianak	1	37.201.200	PAD	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	82.752.000	PAD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pontianak	1	38.702.900	PAD	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pontianak	2	13.080.000	PAD	
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	12	17.920.000	PAD	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kedalam dan Keluar Daerah	12	141.647.400	PAD	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	1	20.812.000	PAD	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1	79.200.000	PAD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terakomodirnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pontianak	4	0	PAD	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pontianak	2	0	PAD	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	<b>564.862.800</b>	<b>PAD</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	12	0	PAD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pontianak	3	103.500.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	100.000.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	461.362.800	PAD	
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Pontianak</b>	<b>78,85</b>	<b>155.072.000</b>	<b>PAD</b>	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pontianak	1	0	PAD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pontianak	4	92.372.000	PAD	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pontianak	10	0	PAD	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pontianak	62	62.700.000	PAD	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pontianak	1	0	PAD	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pontianak	1	0	PAD	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pontianak	1	0	PAD	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pontianak	1	0	PAD	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pontianak	1	0	PAD	



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>41,49</b>	<b>1.441.982.598</b>	<b>PAD</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>41,49</b>	<b>1.441.982.598</b>	<b>PAD</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pontianak, dan Sanggau	800	470.000.000	PAD	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pontianak	200	130.000.000	PAD	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab/Kota se Kalbar	14	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pontianak	2	0	PAD	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pontianak	100	0	PAD	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Pontianak	1	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Pontianak	1	0	PAD	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pontianak	1	0	PAD	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pontianak	1	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Pontianak	28	841.982.598	PAD	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>30,77</b>	<b>257.114.999.900</b>	<b>PAD</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>30,77</b>	<b>257.114.999.900</b>	<b>PAD</b>	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	50	256.927.464.800	PAD	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pontianak	270	187.535.100	PAD	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	14	0	PAD	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>57,01</b>	<b>1.266.999.800</b>	<b>PAD</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>57,01</b>	<b>1.266.999.800</b>	<b>PAD</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pontianak	100	1.266.999.800	PAD	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>0,32</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PAD</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>0,32</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PAD</b>	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pontianak	110	287.799.100	PAD	
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	93	112.200.900	PAD	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap upaya meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,62</b>	<b>1.773.270.100</b>	<b>PAD</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,62</b>	<b>1.773.270.100</b>	<b>PAD</b>	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pontianak, Bengkayang dan Kubu Raya	360	403.507.100	PAD	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pontianak	240	195.000.000	PAD	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	14	0	PAD	



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Forum Forkopimda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pontianak	4	1.174.763.000	PAD	

## 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPD terkait. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada Tabel T-C.33 sebagai berikut:

**Tabel 6 (T-C.33)**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Indeks Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,61</b>	
	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALBAR</b>	<b>Persentase Pemahaman kelompok Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,61</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Pontianak</b>	<b>42,49</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>32,81</b>	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	2	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	1	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	1	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	1	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	1	
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	12	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	3	
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>57,35</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	49	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pontianak	1	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	12	
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pontianak	1	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	1	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pontianak	1	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pontianak	12	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pontianak	1	
	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	4	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	
	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>36,68</b>	
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pontianak	1	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pontianak	1	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	49	
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	1	
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	49	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	15	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	15	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	15	
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kedalam dan Keluar Daerah</b>	<b>34,00</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Pontianak	1	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pontianak	1	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pontianak	2	
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pontianak	1	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	12	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kedalam dan Keluar Daerah	12	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	1	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terakomodirnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pontianak	1	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pontianak	4	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pontianak	2	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pontianak	1	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pontianak	1	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pontianak	1	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	12	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pontianak	3	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Pontianak</b>	<b>78,85</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pontianak	1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pontianak	4	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pontianak	10	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pontianak	62	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pontianak	1	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pontianak	1	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pontianak	1	



No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pontianak	1	
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>41,49</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>41,49</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pontianak, Singkawang, Bengkayang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Ketapang	800	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pontianak	200	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab/Kota se Kalbar	0	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pontianak	0	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pontianak	0	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Pontianak	0	
	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Pontianak	0	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pontianak	0	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pontianak	0	
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Pontianak	28	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>30,77</b>	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>30,77</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parta iPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	50	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pontianak	270	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	0	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>57,01</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>57,01</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pontianak, dan Sambas	100	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>0,32</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>0,32</b>	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pontianak, Singkawang, Sambas	110	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	93	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap upaya meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,62</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,62</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pontianak, Sekadau dan Melawi	360	

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volumen	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pontianak dan Singkawang	240	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Kab/Kota se Kalbar	0	
	Pelaksanaan Forum Forkopimda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pontianak	4	

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berkenaan dengan rencana program, terdapat program prioritas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang sejalan dengan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni:

1. Kerukunan Umat Beragama di Daerah;
2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinekaan;
3. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah;
4. Penghayatan dan Pengamalan Nilai Pancasila;
5. Pengembangan kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini dan deteksi dini;
6. Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) daerah yang efektif;
7. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di Daerah;
8. Pendidikan politik masyarakat di Daerah;
9. Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila bagi pengurus Partai Politik;
10. Fasilitasi Penguatan Demokrasi di Daerah;
11. Peningkatan Kapasitas aparaturnya Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran Ormas;
12. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan Ormas;
13. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
14. Peningkatan Efektifitas FORKOPIKOTA Provinsi, FORKOPIKOTA Kabupaten, FORKOPIKOTA kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksana urusan Pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing;
15. Dukungan sukses persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024- 2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara keseluruhan.



Tujuan Renstra merupakan sesuatu ditetapkan dengan mengacu yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai periode 2024-2026 yakni:

**“Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik”**

Sedangkan sasarannya antara lain:

1. **“Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik”**
2. **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik”**

**Tabel 7**  
Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian
1	2	3	4	
1	Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik	32,61
		1. Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pemahaman kelompok Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	32,61
		2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	B (87,90)
			Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B (66,10)
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	B (66,10)

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program Prioritas yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan didalam peraturan tersebut. Perubahan program prioritas dan program rutin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Prioritas (*Core Business*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, telah ditetapkan 5 (lima) program yang akan mendukung pelaksanaan urusan penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Program Rutin/Generik

Sebagaimana perubahan yang terjadi pada nomenklatur program prioritas (*Core Business*), Program Rutin/Generik yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah juga mengalami perubahan, yaitu menjadi 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mengakomodir seluruh kegiatan rutin/pendukung yang sebelumnya tersebar di beberapa program.

Sehingga dalam perencanaan tahun 2024 ini telah disusun sebanyak:

1. Jumlah Program sebanyak 6 (enam) program
2. Jumlah Kegiatan sebanyak 12 (Dua belas) kegiatan
3. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan kelompok belanja yaitu sebagai berikut:

**Tabel 8 (T-C.34)**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Indeks Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,61</b>	<b>269.090.042.634</b>	<b>PAD</b>		<b>44,59</b>	<b>36.735.735.500</b>
	<b>BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALBAR</b>	<b>Persentase Pemahaman kelompok Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,61</b>	<b>269.090.042.634</b>	<b>PAD</b>		<b>44,59</b>	<b>36.735.735.500</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Pontianak</b>	<b>42,49</b>	<b>7.092.790.236</b>	<b>PAD</b>		<b>71,89</b>	<b>12.678.500.000</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perencanaan</b>	<b>Pontianak</b>	<b>32,81</b>	<b>162.105.700</b>	<b>PAD</b>		<b>65,63</b>	<b>310.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	2	75.665.700	PAD		2	80.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	1	28.122.600	PAD		1	30.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	30.000.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	30.000.000
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	30.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	12	27.074.500	PAD		12	50.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	3	31.242.900	PAD		3	60.000.000
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>57,35</b>	<b>5.635.987.836</b>	<b>PAD</b>		<b>78,68</b>	<b>7.665.000.000</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	49	5.281.059.836	PAD		49	7.000.000.000
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pontianak	1	0	PAD		1	70.000.000
	Pelaksanaan penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Pontianak	12	333.360.000	PAD		12	300.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	70.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	70.000.000
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pontianak	1	0	PAD		1	50.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pontianak	12	21.568.000	PAD		12	80.000.000
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pontianak	1	0	PAD		1	25.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	<b>3.500.000</b>	<b>PAD</b>		<b>66,67</b>	<b>133.500.000</b>
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	15.000.000
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	3.500.000	PAD		1	3.500.000
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	25.000.000
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	25.000.000
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	4	0	PAD		4	25.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	25.000.000
	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pontianak	1	0	PAD		1	15.000.000
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>36,68</b>	<b>79.190.000</b>	<b>PAD</b>		<b>74,37</b>	<b>600.000.000</b>
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pontianak	1	0	PAD		1	30.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pontianak	1	0	PAD		4	250.000.000
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	49	24.190.000	PAD		49	40.000.000
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	1	0	PAD		1	15.000.000



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	49	0	PAD		49	40.000.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	15	0	PAD		15	75.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	15	0	PAD		15	75.000.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	15	55.000.000	PAD		15	75.000.000
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kedalam dan Keluar Daerah</b>	<b>34,00</b>	<b>725.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>67,00</b>	<b>865.000.000</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	10.522.000	PAD		1	20.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	50.234.400	PAD		1	80.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Pontianak	1	37.201.200	PAD		1	80.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	82.752.000	PAD		1	80.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pontianak	1	38.702.900	PAD		1	60.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pontianak	2	13.080.000	PAD		2	20.000.000
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD		1	50.000.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pontianak	12	17.920.000	PAD		12	40.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Kedalam dan Keluar Daerah	12	141.647.400	PAD		12	250.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pontianak	1	20.812.000	PAD		1	150.000.000
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1	79.200.000	PAD		1	35.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terakomodirnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>66,67</b>	<b>1.050.000.000</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD		1	150.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pontianak	4	0	PAD		4	300.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pontianak	2	0	PAD		2	150.000.000
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD		1	150.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD		1	150.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD		1	150.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33,33</b>	<b>564.862.800</b>	<b>PAD</b>		<b>66,67</b>	<b>505.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	12	0	PAD		12	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pontianak	3	103.500.000	PAD		3	150.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	0	PAD		1	100.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pontianak	1	461.362.800	PAD		12	250.000.000
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Pontianak</b>	<b>78,85</b>	<b>155.072.000</b>	<b>PAD</b>		<b>89,42</b>	<b>1.550.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pontianak	1	0	PAD		1	385.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pontianak	4	92.372.000	PAD		4	385.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pontianak	10	0	PAD		10	50.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pontianak	62	62.700.000	PAD		62	150.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pontianak	1	0	PAD		1	50.000.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pontianak	1	0	PAD		1	50.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pontianak	1	0	PAD		1	80.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pontianak	1	0	PAD		1	200.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pontianak	1	0	PAD		1	200.000.000
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>41,49</b>	<b>1.441.982.598</b>	<b>PAD</b>		<b>53,35</b>	<b>8.230.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>41,49</b>	<b>1.441.982.598</b>	<b>PAD</b>		<b>53,35</b>	<b>8.230.000.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pontianak, Dan Sanggau	800	470.000.000	PAD		2425	6.645.000.000
	Peringatan Hari Lahir Pancasila		Pontianak	150	50.000.000	PAD		200	75.000.000
	Peringatan Hari Bela Negara		Pontianak	150	50.000.000	PAD		200	75.000.000
	Lomba Lagu Perjuangan		Pontianak	60	350.000.000	PAD		70	400.000.000
	Lomba Bercerita Sejarah Kebangsaan		Pontianak	75	150.000.000	PAD		80	200.000.000
	Pendidikan Bela Negara		Pontianak	100	250.000.000	PAD		100	250.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dialog Kebangsaan Pembumian Pancasila		Singkawang	80	150.000.000	PAD		100	170.000.000
	Dialog Patriotisme Bela Negara		Pontianak	100	75.000.000	PAD		100	90.000.000
	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalbar		Bengkayang	100	150.000.000	PAD		100	180.000.000
	Dialog Pembauran Kebangsaan		Pontianak	75	100.000.000	PAD		100	100.000.000
	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		Pontianak	100	150.000.000	PAD		100	180.000.000
	Talk Show Wabah Wasbang (Wajib Paham Wawasan Kebangsaan)		Pontianak	100	150.000.000	PAD		100	200.000.000
	Seminar Pembauran Anak Bangsa		Pontianak	100	100.000.000	PAD		100	150.000.000
	Seminar Sejarah Kebangsaan		Pontianak	100	100.000.000	PAD		100	150.000.000
	Seminar Peningkatan Karakter Bangsa		Pontianak	100	150.000.000	PAD		100	200.000.000
	Inventarisasi Sejarah Kebangsaan		Pontianak	1	100.000.000	PAD		1	125.000.000
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Pontianak	115	1.600.000.000	PAD		115	1.800.000.000



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Prov. Kalbar		Pontianak	100	250.000.000	PAD		100	300.000.000
	Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Prov. Kalbar		Pontianak	100	250.000.000	PAD		100	300.000.000
	Penyelenggaraan Pembinaan Tugas Purnapaskibraka Pancasitra Prov. Kalbar		Pontianak	100	250.000.000	PAD		100	300.000.000
	Pembinaan Lanjutan Terhadap Aktifitas Kepakibrakaan, Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila di Prov. Kalbar		Pontianak	100	250.000.000	PAD		100	300.000.000
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara		Sanggau	80	200.000.000	PAD		100	250.000.000
	Seminar Pementapan Wawasan Kebangsaan		Sambas	100	200.000.000	PAD		100	250.000.000
	Pembinaan dan Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)		Kapuas Hulu, Ketapang	160	300.000.000	PAD		160	300.000.000
	Hibah FPK		Pontianak	1	250.000.000	PAD		1	300.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>Pontianak</b>	<b>200</b>	<b>130.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>315</b>	<b>835.000.000</b>
	Rapat Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa		Pontianak	50	75.000.000	PAD		50	85.000.000
	Rapat Koordinasi Forum Pembauran kebangsaan se Kalimantan Barat		Pontianak	80	150.000.000	PAD		80	200.000.000
	Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan se Kalimantan Barat		Pontianak	50	100.000.000	PAD		50	150.000.000
	Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat		Pontianak	35	100.000.000	PAD		35	150.000.000
	Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional		Pontianak	100	200.000.000	PAD		100	250.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Barat								
	<b>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	<b>Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>14</b>	<b>350.000.000</b>
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Internalisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa		Kab/Kota se Kalbar	14	0	PAD		14	350.000.000
	<b>Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan</b>	<b>Pontianak</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>2</b>	<b>400.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</b>	<b>Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</b>							
	Dialog/Sarasehan pembentukan dan penumbuhan karakter		Pontianak	1	0	PAD		1	200.000.000
	Talkshow Penumbuhan karakter pada Keluarga		Pontianak	1	0	PAD		1	200.000.000
	<b>Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila</b>	<b>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</b>	<b>Pontianak</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>100</b>	<b>250.000.000</b>
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Pontianak	100	0	PAD		100	250.000.000
	<b>Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka</b>	<b>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</b>	<b>Pontianak</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>1</b>	<b>250.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Pontianak	1	0	PAD		1	250.000.000
	<b>Pelaksanaan Tugas Paskibraka</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka</b>	<b>Pontianak</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>1</b>	<b>250.000.000</b>
	Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Pontianak	1	0	PAD		1	250.000.000
	<b>Pelaksanaan tugas Duta Pancasila</b>	<b>Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</b>	<b>Pontianak</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>1</b>	<b>250.000.000</b>
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Pontianak	1	0	PAD		1	250.000.000
	<b>Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</b>	<b>Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</b>	<b>Pontianak</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>1</b>	<b>250.000.000</b>
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Pontianak	1	0	PAD		1	250.000.000
	<b>Pembentukan Paskibraka</b>	<b>Jumlah Paskibraka</b>	<b>Pontianak</b>	<b>28</b>	<b>841.982.598</b>	<b>PAD</b>			<b>2.500.000.000</b>
	Pembentukan Paskibraka		Pontianak	28	841.982.598	PAD			2.500.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>30,77</b>	<b>257.114.999.900</b>	<b>PAD</b>		<b>44,73</b>	<b>8.503.087.500</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>30,77</b>	<b>257.114.999.900</b>	<b>PAD</b>		<b>44,73</b>	<b>8.503.087.500</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>							
	<b>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>50</b>	<b>256.927.464.800</b>	<b>PAD</b>		<b>960</b>	<b>7.973.087.500</b>
	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		Pontianak	12	6.668.087.500	PAD		12	6.668.087.500
	Hibah Bantuan Keuangan Kepada KPU		Pontianak	1	334.393.319.600	PAD		0	0

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hibah Bantuan Keuangan Kepada BAWASLU		Pontianak	1	73.493.206.000	PAD		0	0
	Hibah Bantuan Keuangan Kepada TNI dan Polri dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024		Pontianak	2	100.000.000.000	PAD		0	0
	Penguatan Iklan Layanan Pendidikan Politik		Pontianak	1	100.000.000	PAD		0	0
	Verifikasi admintrasi Bantuan Keuangan Parpol Provinsi Kalimantan Barat;		Pontianak	12	60.000.000	PAD		12	60.000.000
	Talk Show Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda		Sambas	100	155.000.000	PAD		100	155.000.000
	Lomba Pidato Etika dan Budaya Politik		Pontianak	20	120.000.000	PAD		20	120.000.000
	Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SLTA		Pontianak	20	120.000.000	PAD		50	120.000.000
	Dialog Demokrasi		Pontianak	100	150000000	PAD		70	150.000.000
	Seminar Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi		Pontianak	500	500.000.000	PAD		500	500.000.000
	Dialog Pendidikan Politik Bagi Perempuan		Pontianak	150	150.000.000	PAD		150	150.000.000



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat		Pontianak	50	50.000.000	PAD		70	50.000.000
	Pembinaan Politik bagi Pemilih Pemula		14 Kab/Kota se Kalbar	980	1.150.000.000	PAD		0	0
	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>270</b>	<b>187.535.100</b>	<b>PAD</b>		<b>120</b>	<b>280.000.000</b>
	Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia		Pontianak	70	60.000.000	PAD		70	100.000.000
	Rapat Koordinasi Politik Dalam Negeri		Pontianak	70	60.000.000	PAD		50	80.000.000
	Rakor Pemilihan Umum dan Rakor Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024		Pontianak	200	250.000.000	PAD		0	0

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>14</b>	<b>350.000.000</b>
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024			14	0	PAD		14	350.000.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>57,01</b>	<b>1.666.999.800</b>	<b>PAD</b>		<b>78,58</b>	<b>1.610.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>57,01</b>	<b>1.666.999.800</b>	<b>PAD</b>		<b>78,58</b>	<b>1.610.000.000</b>
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>	<b>Pontianak, dan Sambas</b>	<b>100</b>	<b>1.666.999.800</b>	<b>PAD</b>		<b>120</b>	<b>1.610.000.000</b>
	Fasilitasi Pelayanan Verifikasi Surat Keterangan Terdaftar dan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat		Pontianak	50	120.000.000	PAD		20	70.000.000
	Tim Verifikasi Pengelolaan Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan		Pontianak	1	70.000.000	PAD		1	290.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penghargaan Ormas Kategori terbaik dalam rangka Dukungan Pembangunan Pemerintah Daerah (Ceremony Awards)		Pontianak	1	200.000.000	PAD		1	400.000.000
	Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat		Pontianak	2	50.000.000	PAD		2	100.000.000
	Hibah FKUB		Pontianak	1	250.000.000	PAD		1	300.000.000
	Hibah LVRI		Pontianak	1	150.000.000	PAD		1	200.000.000
	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat		Pontianak	70	100.000.000	PAD		100	250.000.000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>0,32</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>0,55</b>	<b>1.966.648.000</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>0,32</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>0,55</b>	<b>1.966.648.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>							
	<b>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>	<b>Pontianak, Singkawang, Sambas</b>	<b>555</b>	<b>400.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>705</b>	<b>1.916.648.000</b>
	Dialog P4GN Dengan Generasi Muda Milenial dan Elemen Masyarakat		Pontianak	150	120.000.000	PAD		200	400.000.000
	Penguatan Nilai-Nilai Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal dalam rangka Memperkokoh Kebhinekaan		Pontianak	75	100.000.000	PAD		75	150.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Forum Kerukunan umat Beragama di Kalimantan Barat		Singkawang dan Sambas	150	200.000.000	PAD		250	1.126.648.000
	Penguatan Sikap Toleransi Beragama Pelajar dan Mahasiswa		Pontianak	60	70.000.000	PAD		60	70.000.000
	Dialog Lintas Agama		Pontianak	60	85.000.000	PAD		60	85.000.000
	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi		Pontianak	60	85.000.000	PAD		60	85.000.000
	<b>Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah</b>	<b>Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>93</b>	<b>112.200.900</b>	<b>PAD</b>		<b>200</b>	<b>250.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>14</b>	<b>50.000.000</b>
	Monitoring Penghayat Kepercayaan di Daerah		14 Kab/Kota se Kalbar	14	150.000.000	PAD		14	50.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap upaya meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,62</b>	<b>1.773.270.100</b>	<b>PAD</b>		<b>51,26</b>	<b>3.747.500.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>32,62</b>	<b>1.773.270.100</b>	<b>PAD</b>		<b>51,26</b>	<b>3.747.500.000</b>
	<b>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</b>	<b>Pontianak, Sekadau dan Melawi</b>	<b>360</b>	<b>403.507.100</b>	<b>PAD</b>		<b>440</b>	<b>957.500.000</b>
	Hibah FKDM		Pontianak	1	200.000.000	PAD		1	200.000.000
	Hibah FKPT		Pontianak	1	200.000.000	PAD		1	200.000.000



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemantapan Nilai-nilai Multikulturalisme pada Pelajar Menengah Atas dan generasi muda di Prov. Kalbar sebagai upaya pencegahan konflik di kalangan pelajar dan generasi muda		Sekadau dan Melawi	200	200.000.000	PAD		300	360.000.000
	Lomba Video Pendek "Tolak Terorisme"se Kalimantan Barat		Pontianak	35	97.500.000	PAD		40	100.000.000
	Pengembangan Kapasitas Tim Sekretariat PKS Provinsi dan Kabupaten /Kota se- Kalimantan Barat		Pontianak	100	47.500.000	PAD		100	47.500.000
	Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional Provinsi Kalimantan Barat		Pontianak	1	50.000.000	PAD		1	50.000.000
	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar</b>	<b>Pontianak dan Singkawang</b>	<b>240</b>	<b>195.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>390</b>	<b>725.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah</b>	<b>Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</b>							
	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penangana Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat		Pontianak dan Singkawang	150	135.000.000	PAD		150	250.000.000
	Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota se Kalimantan Barat		Pontianak	100	97.500.000	PAD		100	250.000.000
	Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat se Kalimantan Barat		Pontianak	50	65.000.000	PAD		80	150.000.000
	Rapat Koordinasi Tim Puskomin se Kalimantan Barat		Pontianak	60	75.000.000	PAD		60	75.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</b>	<b>14 Kab/Kota se Kalbar</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>PAD</b>		<b>14</b>	<b>65.000.000</b>
	Pemantauan Kegiatan Dan Keberadaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing Di Kalimantan Barat		14 kab/kota	14	0	PAD		14	65.000.000
	<b>Pelaksanaan Forum Forkopimda</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</b>	<b>Pontianak</b>	<b>4</b>	<b>1.174.763.000</b>	<b>PAD</b>		<b>4</b>	<b>2.000.000.000</b>

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Kelompok Belanja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Pontianak	4	1.174.763.000	PAD		4	2.000.000.000

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 merupakan dokumen penting untuk memberikan arah Rencana Kerja Badan Kesbangpol perencanaan pembangunan tahunan guna mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebagai pedoman resmi bagi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan sebagai acuan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru. Dalam Rencana Kerja ini berisikan rencana penganggaran pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, sesuai usulan yang telah disampaikan dan apabila tidak tersedia anggaran yang cukup maka beberapa kegiatan akan disesuaikan anggaran yang tersedia.